

PEMATUHAN DAN PELANGGARAN PRINSIP KESOPANAN SERTA FUNGSINYA DALAM WACANA TERKAIT USULAN DANA ASPIRASI DPR DI RUBRIK POLITIK KOMPASIANA

COMPLIANCE AND VIOLATION OF POLITENESS PRINCIPLES AND ITS FUNCTION ON THE DISCOURSE OF ASPIRATION FUND PROPOSED BY REPRESENTATIVE IN KOMPASIANA POLITICS RUBRIC

Ali Kusno

Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur

Pos-el: *alikusnolambung@gmail.com*

Naskah masuk: 25 Januari 2015; naskah direvisi I: 2-8 April 2015; naskah direvisi II: 20-25 April 2015 naskah disetujui terbit: 26 Mei 2015. Editor Edi Setiyanto.

Abstrak

Wacana dana aspirasi sebesar Rp11,2 triliun yang diusulkan DPR menjadi polemik dalam masyarakat. Polemik itu terjadi, salah satunya pada media sosial Kompasiana. Untuk itu, tulisan ini membahas fenomena pragmatik (pematuhan dan pelanggaran) pada rubrik Kompasiana dengan metode deskriptif kualitatif. Sementara itu, dalam pemerolehan data digunakan teknik unduh dan dalam penganalisisan digunakan metode interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para kompasianer (penulis artikel) mematuhi prinsip-prinsip kesopanan. Prinsip kesopanan yang digunakan meliputi maksim kearifan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, dan maksim simpati. Pematuhan tersebut menunjukkan bahwa kompasianer menempatkan diri sebagai bagian masyarakat. Di sisi lain, pelanggaran prinsip kesopanan meliputi maksim pujian, yakni mengkritik langsung; bertutur kasar, sengaja ingin memojokkan mitra tutur, dan menyampaikan tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap mitra tutur. Pelanggaran maksim kesepakatan ditunjukkan dengan pertentangan pemahaman mengenai usulan dana aspirasi DPR. Pelanggaran-pelanggaran itu berfungsi untuk menyampaikan kritik pedas kepada anggota DPR.

Kata kunci: pragmatik, kesantunan, Kompasiana

Abstract

Discourse aspiration funds amounting to Rp 11.2 trillion which is proposed by House of Representatives is being debated in society. Polemics happens, one of them on social media Kompasiana. Therefore, this study discusses pragmatics phenomenon (compliance and violation) of Kompasiana rubric with descriptive qualitative method. Meanwhile, the data is obtained by using download techniques and in analyzing data employs interactive methods. The result shows that the kompasianer (author of the article) adheres to the principles of modesty. Politeness principles used include tact maxim, approbation maxim, modesty maxim, agreement maxim and sympathy maxim. The compliance function indicates that kompasianer get themselves as part of society. Meanwhile, violation of the modesty principle covers praise maxims, namely denounces members of Parliament in various ways, such as directly criticize with harsh words or phrases; speak with a driven sense of emotion; deliberately want to discredit hearer; convey the charges on the basis of suspicion against the hearer. Further violation of agreement maxim shows by the opposition understanding of the Representative aspiration fund. The intention of violation is to convey scathing criticism to members of Representative members.

Keywords: pragmatic, politeness, Kompasiana

1. Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat menggulirkan usulan dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun. Rapat paripurna DPR pada 23 Juni 2015 memutuskan untuk mengesahkan peraturan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi (dalam <http://nasional.kompas.com>). Pemerintah secara tegas memberikan penolakan usulan dana aspirasi tersebut. Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menyebut Presiden Joko Widodo telah menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi. Andrinof menambahkan bahwa dana aspirasi tidak sesuai dengan rencana dan visi misi Presiden Jokowi (dalam www.merdeka.com). Selain dari pemerintah, keputusan DPR tersebut juga memicu penolakan dari masyarakat. Beragam opini pun berkembang di masyarakat. Sebagian besar masyarakat memberikan penolakan terhadap usulan tersebut. Masyarakat menyampaikan keluhan dan penolakan, mengenai usulan dana aspirasi, melalui berbagai media sosial.

Salah satu media sosial yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan penolakan dana aspirasi ialah *Kompasiana*. Masyarakat melalui rubrik Politik *Kompasiana* menyampaikan penolakan berdasarkan sudut pandang masing-masing. Semua tulisan kompasianer (sebutan bagi penulis artikel di *Kompasiana*) yang terkait dengan usulan dana aspirasi DPR berisi penolakan dan kritikan bagi DPR. Para kompasianer menyampaikan kritik kepada DPR dengan penggunaan bahasa yang variatif. Sebagian kompasianer menggunakan nuansa emosi dalam tulisan-tulisan yang diunggah di rubrik Politik *Kompasiana*. Padahal, dalam penyampaian seperti di media massa, kritik tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip kesopanan tersebut.

Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk menganalisis pematuhan dan pelanggaran prinsip-prinsip kesopanan pada rubrik Politik di *Kompasiana* yang membahas usulan dana aspirasi DPR. Selain itu, dalam penelitian ini

juga dianalisis fungsi pematuhan dan pelanggaran tersebut. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi para kompasianer ketika membuat tulisan, khususnya di media sosial *Kompasiana*.

2. Landasan Teori

2.1 *Kompasiana*

Kompasiana merupakan blog jurnalis yang berada di bawah *Kompas Online*. Setiap orang yang tergabung dalam *Kompasiana* bebasewartakan peristiwa. Kompasianer juga dapat menyampaikan pendapat, gagasan, dan aspirasinya dalam bentuk tulisan, gambar, rekaman audio, atau video. *Kompasiana* (dalam <http://id.wikipedia.org>) menampung beragam konten dari semua lapisan masyarakat, juga dari beragam latar belakang budaya, hobi, profesi, dan kompetensi.

Rubrik Politik merupakan salah satu halaman yang memuat artikel-artikel menarik terkait perkembangan politik. Rubrik Politik memiliki banyak peminat. Isu yang diangkat selalu dinamis, mengikuti perkembangan perpolitikan nasional dan internasional. Isu perpolitikan nasional selalu menarik untuk disimak. Seiring kebebasan berpendapat, masyarakat leluasa bebas menyampaikan ulasan maupun kritikan terhadap kebijakan yang tidak prorakyat.

Kompasiana memberikan keleluasaan bagi para kompasianer untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Meskipun demikian, sebagai bentuk kontrol, *Kompasiana* memiliki aturan atau etika bagi setiap artikel kompasianer. Salah satunya, dengan mengedepankan penggunaan bahasa yang sopan.

2.2 Prinsip Kesopanan

Kesopanan dalam *KBBI Daring* dimaknai 1) adat sopan santun; tingkah laku (tutur kata) yang baik; tata krama; 2) keadaban; peradaban; 3) kesusilaan (dalam <http://badanbahasa>).

kemdikbud.go.id). Kesopanan, berdasarkan definisi tersebut merupakan bentuk adat sopan santun dalam bertingkah laku (tutur kata) yang baik. Sedangkan menurut Leech (1993:161) sopan santun sering diartikan secara dangkal sebagai suatu 'tindakan yang sekadar beradab'. Dengan itu, makna yang lebih mendalam tentang *sopan santun berbahasa* ialah adat sopan santun tutur kata yang baik yang mengaitkan daya dan makna yang dalam pelaksanaannya dapat mengabaikan prinsip kerja sama. Artinya, prinsip kerja sama tidak dapat menjelaskan mengapa manusia sering menggunakan cara yang tidak langsung untuk menyampaikan apa yang dimaksud. Oleh karena itu, dalam hal ini peranan sopan santun menjadi penting. Sopan santun tidak sebatas mengungkapkan cara bertutur yang sopan, melainkan juga mengungkapkan alasan penggunaan bahasa tersebut.

Penelitian kesopanan berbahasa berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat. Menurut Rahardi (2009:35) penelitian kesopanan mengkaji penggunaan bahasa (*language use*) dalam suatu masyarakat bahasa tertentu. Masyarakat tutur yang dimaksud adalah masyarakat dengan aneka latar belakang situasi sosial dan budaya yang mewadahnya. Hal yang dikaji dalam penelitian kesopanan ialah maksud dan fungsi tuturan.

Sebagai retorika interpersonal, pragmatik membutuhkan prinsip kesopanan (*politeness principle*). Prinsip kesopanan tersebut berhubungan dengan dua peserta percakapan, yakni diri sendiri (*self*) dan orang lain (*other*) (Wijana, 2009:51). Diri sendiri adalah penutur. Orang lain adalah lawan tutur dan orang ketiga yang dibicarakan antara penutur dan lawan tutur. Dalam konteks artikel di rubrik Politik *Kompasiana*, diri sendiri adalah Kompasianer (penulis), sedangkan orang lain adalah masyarakat (pembaca), dan orang ketiga ialah orang yang dibicarakan penulis (anggota DPR, pemerintah, dan masyarakat).

Selain memperhatikan pihak-pihak terkait, menurut Chaer dalam Masfufah (2013:103) ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan dalam memberikan tuturan, yaitu (1) identitas sosial budaya para partisan (penutur dan lawan tutur), (2) topik tuturan, (3) konteks waktu, situasi, dan tempat penuturan berlangsung. Selain itu, tuturan juga dipengaruhi oleh tujuan pertuturan. Dengan demikian, dalam bertutur (lisan maupun tulisan) harus diperhatikan identitas sosial budaya para partisan, topik tuturan, konteks, dan juga tujuan. Hal-hal pokok tersebut menjadi pertimbangan kesopanan dalam tuturan. Pesan yang disampaikan dapat dengan baik diterima peserta tutur apabila komunikasi yang terjalin mempertimbangkan prinsip-prinsip kesopanan berbahasa.

Prinsip kesopanan berbahasa sebagaimana dikemukakan oleh Leech (1993:206-207) mencakupi hal-hal berikut.

- a. Maksim kearifan (*tact maxim*). Buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin. Buatlah keuntungan orang lain sebesar mungkin.
- b. Maksim kedermawanan (*generosity maxim*). Buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin. Buatlah kerugian diri sendiri sebesar mungkin.
- c. Maksim pujian (*approbation maxim*). Kecamlah orang lain sesedikit mungkin. Pujilah orang lain sebanyak mungkin.
- d. Maksim kerendahan hati (*modesty maxim*). Pujilah diri sendiri sesedikit mungkin. Kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin.
- e. Maksim kesepakatan (*agreement maxim*). Usahakan agar kesepakatan dari orang lain terhadap diri sendiri sesedikit mungkin. (Usahakan agar kesepakatan dari diri sendiri terhadap orang lain terjadi sebanyak mungkin).
- f. Maksim simpati (*sympathy maxim*). Kurangi sebanyak-banyaknya rasa antipati terhadap orang lain. Tingkatkan rasa simpati sebanyak-banyaknya terhadap orang lain).

Penerapan maksim-maksim tersebut diharapkan dapat ditaati. Namun, Leech (1993:209) mengungkapkan bahwa maksim-maksim tersebut hendaknya ditaati sampai batas-batas tertentu. Bukannya ditaati sebagai kaidah secara absolut. Saran itu berlaku khususnya bagi sub-submaksim yang lebih lemah (dinyatakan dalam tanda kurung). Dalam komunikasi, seseorang yang pada setiap kesempatan selalu merendahkan diri akan menjadi orang yang sangat membosankan. Selain itu, orang tersebut akan dinilai sebagai orang yang tidak tulus dan tidak sungguh-sungguh.

Pada tujuan tertentu, pematuhan prinsip-prinsip kesopanan dapat menjadi lebih longgar. Kritikan akan menjadi sangat membosankan atau aneh apabila dilontarkan dengan bahasa yang sopan, terlebih dalam dunia jurnalisme warga yang cenderung bebas berpendapat. Para netizen (termasuk Kompasianer) biasanya menggunakan bahasa yang lugas, yang memungkinkan terjadinya pelanggaran prinsip-prinsip kesopanan. Kondisi seperti itu membuat penutur harus juga memperhatikan hal-hal yang menyebabkan pelanggaran prinsip kesopanan. Pranowo (2009:68-73) mengungkapkan beberapa faktor atau hal yang menyebabkan pelanggaran prinsip kesopanan.

- a. Penutur menyampaikan kritik secara langsung (menohok mitra tutur) dengan kata atau frase yang kasar.
- b. Penutur didorong rasa emosi ketika bertutur.
- c. Penutur protektif terhadap pendapatnya.
- d. Penutur sengaja ingin memojokkan mitra tutur dalam bertutur.
- e. Penutur menyampaikan tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap mitra tutur.

Pelanggaran terhadap maksim-maksim kesopanan tentunya memiliki fungsi tertentu. Fungsi tersebut yang mendasari kesengajaan penutur melakukan pelanggaran kesopanan. Oleh karena itu, pengungkapan fungsi pematuhan dan pelanggaran prinsip kesopanan sangat menarik dan penting dilakukan.

3. Metode, Data, dan Sumber Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang memanfaatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan tentang sifat individu, keadaan, gejala dari kelompok tertentu yang dapat diamati (Moleong, 1994:6). Penelitian ini berhubungan dengan pemakaian bahasa dalam rubrik Politik di *Kompasiana*, khususnya yang terkait dengan polemik usulan dana aspirasi DPR. Sehubungan dengan itu, untuk mengkaji kesopanan di rubrik Politik *Kompasiana* terkait wacana tersebut, peneliti menggunakan pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik digunakan untuk mengkaji maksud pembicara yang dapat tersurat maupun tersirat di balik tuturan yang dianalisis. Makna yang ditimbulkan ternyata beragam.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengunduh artikel dari rubrik Politik *Kompasiana* terkait polemik usulan dana aspirasi DPR. Dasar yang dipakai dalam penentuan artikel mempertimbangkan variasi isi dan penggunaan bahasa. Metode analisis data menggunakan model interaktif, seperti yang dikemukakan Miles dan Huberman (2007:19-20). Metode itu terdiri atas tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Pengkajian atas ketiga komponen itu dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data.

4. Pembahasan

4.1 Pematuhan Prinsip Kesopanan serta Fungsinya dalam Wacana Usulan Dana Aspirasi DPR di Rubrik Politik *Kompasiana*

Penggunaan bahasa di *Kompasiana* ditekankan pada penggunaan bahasa yang sopan. Isi artikel rubrik politik terkait usulan dana aspirasi DPR tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa masyarakat menolak usulan tersebut. Artikel-artikel di rubrik Politik *Kompasiana* memperlihatkan adanya pematuhan dan pelanggaran prinsip kesopanan. Berikut ini deskripsi pematuhan prinsip kesopanan di rubrik Politik *Kompasiana* terkait usulan dana aspirasi DPR.

4.1.1 Maksim Kearifan (*Tact Maxim*)

Hal yang mendasari maksim kearifan adalah tindak tutur untuk memaksimalkan keuntungan pihak lain dan meminimalkan keuntungan sendiri. Pada saat melaksanakan maksim kearifan, penutur dapat menghindari sikap iri dengki dan sakit hati pada mitra tutur. Artikel berjudul "Politik Gratisan Dana Aspirasi" ini mengedepankan maksim kearifan.

- 1) Sesungguhnya akan lebih elegan jika para politisi ini berkaca kepada kondisi ekonomi yang belum pulih dewasa ini dengan berempati pada kesulitan sebagian besar rakyat secara cerdas dan merakyat sehingga tidak akan ada lagi pendekatan melulu sumbangan untuk perbaikan jalan, bangunan dan irigasi pertanian. Juga layak untuk diingat para politisi bahwa para pendiri bangsa ini tidak pernah mengajarkan dan memberi contoh semacam itu, dan tak sedangkal itu pula pelaksanaan jargon politik "menangis dan tertawa bersama rakyat".

Dalam penggalan artikel (1) tersebut tampak jelas bahwa kompasianer (penulis artikel) memaksimalkan keuntungan bagi masyarakat dengan mengajak anggota DPR (orang ketiga) melihat kondisi ekonomi Indonesia yang masih dalam kondisi menurun. Terlebih lagi, Bank

Indonesia (BI) kembali memberikan koreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 hanya akan mencapai level 5,1 persen. Angka tersebut tentunya lebih rendah dibanding perkiraan pemerintah yang 5,4 persen (dalam <http://ekonomi.metrotvnews.com>). Dengan melihat kondisi ekonomi tersebut, diharapkan anggota DPR dapat berempati dengan kesulitan sebagian besar masyarakat. Selain itu, kompasianer mengingatkan para anggota DPR tentang hakikat jargon politik 'menangis dan tertawa bersama rakyat'. Kompasianer mengajak para anggota DPR ikut merasakan kesulitan yang dialami masyarakat.

Pematuhan maksim kearifan juga terdapat pada artikel yang berjudul "Kekuatan Setan di Belakang DPR."

- 2) Untuk itu, kelompok-kelompok yang punya basis nasionalis baik berasal dari agama mana pun serta para orang baik penegak kebenaran di negeri ini untuk bersatu memberangus kekuatan kelompok setan tersebut. Dengan demikian, bangsa ini bisa fokus mewujudkan amanat penderitaan rakyat dan cita-cita negara ini didirikan, yaitu negara yang adil, sejahtera, aman makmur sentosa dan bangsa yang berharkat - bermartabat di mata dunia.

Dalam penggalan artikel (2) tersebut, kompasianer terlihat memaksimalkan keuntungan kepada orang ketiga, yakni pembaca masyarakat Indonesia. Kompasianer mengajak masyarakat agar peduli terhadap kondisi bangsa dan bersatu menentang usulan dana aspirasi DPR. Kompasianer tersebut mengharapkan agar bangsa Indonesia bisa fokus mewujudkan amanat penderitaan rakyat dan cita-cita bangsa ketika didirikan. Cita-cita bangsa ketika didirikan mewujudkan negara yang adil, sejahtera, aman, makmur, sentosa, dan bermartabat di mata dunia.

Kedua penggalan artikel tersebut menunjukkan bahwa kedua kompasianer sebagai penutur telah menjalankan prinsip kearifan. Hal

itu diwujudkan dengan memberikan keuntungan kepada orang ketiga, yakni masyarakat. Kritik yang diberikan kepada para anggota DPR, sebagai pihak kedua, disampaikan dengan tuturan yang mengedepankan kesopanan.

4.1.2 Maksim Pujian (*Approbation Maxim*)

Seseorang dapat dianggap sopan apabila dalam bertutur memberikan pujian atau penghargaan kepada orang lain. Penggunaan maksim pujian dapat menimbulkan rasa hormat tanpa saling merendahkan, menjelek-jelekan, atau mengecam pihak lain. Tuturan yang tidak seperti itu dianggap tidak sopan. Penggalan artikel "Penolakan Dana Aspirasi dan 'Politik Kabut' SBY" mematuhi maksim pujian.

- 3) Para petinggi Partai Demokrat akan mengira, atas sikap SBY terkait Dana Aspirasi, dapat menaikkan tingkat kepercayaan rakyat kepada Demokrat akan semakin naik secara signifikan. Itulah yang diharapkan terutama menghadapi pergulatan politik di tahun 2019 mendatang. SBY dan Demokrat dengan cara ini akan merebut simpatik rakyat

Pada penggalan artikel (3) tersebut kompasianer menggunakan maksim pujian terhadap langkah Partai Demokrat dan sikap SBY terkait usulan dana aspirasi. Kompasianer mengapresiasi SBY yang menentang usulan dana aspirasi DPR meskipun kebijakan Partai Demokrat mendukung pengajuan dana aspirasi. Kompasianer berpersepsi bahwa sikap SBY tersebut untuk menarik simpati rakyat. Pemberian pujian tersebut dilakukan dengan menonjolkan sisi positif dari mitra tutur (Partai Demokrat dan SBY). Pematuhan maksim pujian tersebut menumbuhkan kesopanan.

4.1.3 Maksim Kerendahan Hati (*Modesty Maxim*)

Maksim kerendahan hati menuntut setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan ketidakhormatan pada diri sendiri, dan meminimalkan rasa hormat pada diri sendiri (Wijana,

1996:58). Dengan itu rasa rendah hati diwujudkan dengan tidak menyombongkan diri dan sebanyak mungkin mengecam diri sendiri. Kesopanan kompasianer dengan maksim kerendahan hati terdapat pada artikel "Dana Aspirasi atau Konspirasi?" berikut.

- 4) Masyarakat dengan segala kepolosannya pun menilai dana aspirasi sangat rawan untuk dikorupsi. Jika disetujui, sama saja membenarkan wakil rakyat untuk membuat proyek pembangunan dan merangsang mereka mencari proyek.

Kompasianer pada penggalan artikel (4) tersebut menempatkan diri sebagai masyarakat. Kompasianer menunjukkan kerendahan hati dengan kalimat *masyarakat dengan segala kepolosannya pun....* Berdasarkan penggalan kalimat tersebut, masyarakat diidentikkan dengan kepolosan. Kepolosan masyarakat tersebut dimaknai seolah-olah tidak mengetahui persoalan dan perkembangan politik. Pematuhan maksim kerendahan hati dalam artikel tersebut dapat menumbuhkan rasa santun bagi mitra tutur (anggota DPR) meskipun secara keseluruhan artikel berisi kritikan.

4.1.4 Maksim Kesepakatan (*Agreement Maxim*)

Pemakaian maksim kesepakatan dalam tindak tutur dapat menjalin kesepahaman antarpeserta tutur. Kesepakatan yang terjalin antarpeserta tutur dianggap sebagai sikap yang santun. Artikel berjudul "Akrobat Ala Demokrat Dalam Dana Aspirasi" mematuhi maksim kesepakatan.

- 5) "Itulah permainan politik topeng yang memalukan dan memilukan. Seharusnya, kalau memang setuju ya sikapnya harus setuju, siapkan argumentasi dan apa pun resiko politiknya. Kalau menolak, seharusnya ya menolak dengan tegas," kata Pasek, kepada kompas.com, Rabu (24/6) kemarin. Apa yang disampaikan Pasek, tidaklah salah. Sebab, dalam rapat paripurna, Selasa (23/6) lalu,

Demokrat bersama enam fraksi lainnya mendukung dana aspirasi.

Kompasianer dalam penggalan artikel (5) tersebut mematuhi maksim kemufakatan atau kesepakatan dengan menyatakan kesepakatan terhadap pernyataan Gede Pasek. Kompasianer tersebut sepakat bahwa sikap SBY tidak ubahnya permainan politik yang memalukan dan memilukan. Kompasianer juga sepakat perlunya SBY dan Partai Demokrat menunjukkan ketegasan antara setuju ataukah menolak dana aspirasi DPR. Kesepakatan kompasianer terhadap pernyataan Gede Pasek menimbulkan kesopanan terhadap mitra tutur. Kesepakatan tersebut merupakan bentuk upaya kompasianer mematuhi maksim kesepakatan sebagai bagian kesopanan tutur.

4.1.5 Maksim Simpati (*Sympathy Maxim*)

Penggunaan maksim simpati oleh peserta tutur dapat menumbuhkan rasa mawas diri antarpeserta tuturan. Rasa simpati yang diwujudkan dalam penggunaan tuturan dianggap sebagai sesuatu yang sopan. Sebaliknya, peserta tutur yang menggunakan tuturan yang mengungkapkan rasa antipati dianggap tidak sopan. Terdapat beberapa penggalan rubrik Politik di *Kompasiana* yang mengandung maksim simpati, seperti pada penggalan artikel berjudul "Dana Aspirasi atau Konspirasi?".

- 6) Masih teringat jelas kebijakan pemerintahan berdasarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2015 tentang penambahan anggaran uang muka atau *down payment* (DP) mobil bagi pejabat negara, meskipun sudah dicabut, hal itu meninggalkan cerita yang melukai hati rakyat karena permintaan keluarnya Perpres tersebut adalah dari para wakil rakyat di DPR. Sekarang, pemberitaan di tanah air sudah diramaikan lagi oleh kelakuan anggota DPR dengan meloloskan rancangan peraturan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang lebih dikenal dengan sebutan "dana aspirasi".

Kompasianer dalam penggalan artikel (6) tersebut menunjukkan rasa simpati dengan perasaan pembaca (masyarakat). Kompasianer bersimpati bahwa perasaan masyarakat pernah terlukai karena permintaan DPR agar presiden mengeluarkan Perpres penambahan anggaran uang muka mobil bagi pejabat negara. Sekarang DPR kembali melukai rakyat dengan meloloskan rancangan peraturan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) aspirasi. Kompasianer bersimpati dengan perasaan rakyat yang dalam kesulitan ekonomi, sedangkan DPR terkesan lebih mementingkan kepentingan kelompok atau pribadi.

Kompasianer lain yang juga bersimpati pada perasaan masyarakat terdapat dalam artikel berjudul "Dana Aspirasi; Kepedulian ke Rakyat atau Melanjutkan Tradisi Rampok Uang Rakyat" berikut.

- (7) Jika kita mencoba melihat dari sisi atau aspek keadilan dengan mudah kita bisa membayangkan akan terjadi ketimpangan yang sangat mencolok antara daerah pemilihan (dapil) yang berada di Jawa dan dapil yang ada di luar Pulau Jawa seperti Indonesia Timur. Hal ini disebabkan karena anggota DPR RI yang berada di daerah Jawa lebih mayoritas ketimbang anggota DPR yang di luar Jawa. Proporsi yang kurang begitu *balances* inilah harusnya menjadi kajian awal sebelum memutuskan persoalan yang besar

Pada penggalan artikel tersebut, kompasianer menaruh simpati terhadap masyarakat di daerah Indonesia Timur. Seandainya dana aspirasi dicairkan berdasarkan daerah pemilihan, masyarakat yang tinggal di daerah luar Jawa utamanya Indonesia Timur sangat dirugikan. Hal itu didasari pertimbangan jumlah anggota DPR di wilayah Indonesia Timur sangat sedikit. Kompasianer bersimpati akan terjadi ketimpangan yang mencolok antara da-

erah pemilihan (dapil) yang berada di Jawa dan dapil yang berada di wilayah Indonesia Timur.

Simpaty para kompasianer dalam artikel-artikel tersebut menunjukkan bahwa kompasianer menjalankan maksim simpaty. Perasaan kompasianer menyatu dan merasakan ke-luhan rakyat sebagai perwujudan mawas diri. Kompasianer ikut merasakan yang pihak ketiga (masyarakat) rasakan.

Berdasarkan deskripsi pematuhan berbagai prinsip kesopanan, yakni maksim kearifan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, dan maksim simpaty para kompasianer menempatkan diri sebagai bagian masyarakat. Kompasianer sebagai bagian masyarakat menyampaikan kritikan kepada anggota DPR yang telah menyetujui usulan dana aspirasi. Pematuhan prinsip-prinsip tersebut membuat berbagai kritikan tetap sopan bagi anggota DPR. Sedangkan pembaca (masyarakat) merasa dibela dan mendapat dukungan untuk menentang usulan dana aspirasi tersebut.

Selain pematuhan prinsip-prinsip kesopanan tersebut, artikel para kompasianer didominasi pelanggaran prinsip kesopanan. Usulan dana aspirasi DPR tersebut mendapat penolakan dari hampir seluruh lapisan masyarakat. Salah satu media yang menyampaikan penentangan tersebut diwujudkan dalam *Kompasiana*. Para kompasianer secara terbuka mengungkapkan penolakan dengan disertai kemarahan dan kekecewaan. Para kompasianer melakukan berbagai pelanggaran prinsip kesopanan. Berikut ini merupakan contoh pelanggaran prinsip kesopanan terkait wacana usulan dana aspirasi DPR dalam rubrik Politik *Kompasiana*.

4.2 Pelanggaran Prinsip Kesopanan dan Fungsinya

4.2.1 Pelanggaran Maksim Pujian (*Approbation Maxim*)

Pelanggaran maksim pujian dilakukan dengan memberikan kecaman keras sehingga

cenderung merendahkan dan menjelek-jelekan pihak lain. Kecaman keras para kompasianer tersebut diungkapkan dengan berbagai cara.

4.2.1.1 Penggunaan Kata atau Frasa yang Kasar

Kritikan secara langsung (menohok) dengan menggunakan kata atau frasa yang kasar mengakibatkan ketidaksopanan. Ketidaksopanan terlihat pada penggalan artikel berjudul "DPR Mensahkan Cara Mereka Korupsi Berjamaah" berikut.

- (8) Cara anggota DPR melakukan upaya untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat di dapilnya dengan alasan percepatan pembangunan sejatinya hanyalah akal-akalan saja dimana mereka ingin mengabdikan dengan cara yang yang halal

Kompasianer tersebut memberikan kritikan secara langsung dan menohok para anggota DPR. Kata atau frasa kasar yang digunakan pada data (8) tersebut, yaitu *hanyalah akal-akalan saja*. Kompasianer secara langsung menyampaikan bahwa sejatinya anggota DPR hanya akal-akalan mengesahkan usulan dana aspirasi tersebut. Penggunaan kata atau frasa kasar juga digunakan pada artikel berjudul "Benang Merah Dana Aspirasi dengan Revisi UU KPK" berikut.

- (9) DPR tetap ngotot mengesahkan dana aspirasi. Para penyamun di sana justru mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Presiden Jokowi. Jika pemerintah tidak menyetujui dana aspirasi, mereka akan mengatakan kepada rakyat bahwa tidak lancarnya aspirasi adalah salah Jokowi. Pernyataan yang menggelikan mengingat bahwa respon masyarakat justru menolak dana aspirasi. Rupanya anggota-anggota DPR itu mengira mereka masih bisa membohongi rakyat.

Kompasianer dalam penggalan artikel (9) tersebut memberikan kritikan secara langsung

dengan menggunakan kata atau frasa yang kasar, berupa *para penyamun* dan *membohongi rakyat*. Kompasianer tersebut menyamakan anggota DPR dengan penyamun (perampok). Selain itu, kompasianer mempersepsikan bahwa selama ini anggota DPR telah banyak membohongi rakyat. Namun, anggota DPR harus menyadari rakyat sudah pintar dan tidak dapat dibohongi lagi.

Kritikan secara langsung dan menohok anggota DPR sangat terasa pada artikel berjudul "Penolakan Dana Aspirasi dan 'Politik Kabut' SBY".

(10) Usulan "Dana Aspirasi" yang menjadi program unggulan para politisi haus perselingkuhan harta dan Kekuasaan akhirnya disetujui. Dalam sidang paripurna hanya ada tiga Fraksi yang menolak yaitu PDI Perjuangan, NasDem dan Hanura. Sedangkan Fraksi Demokrat yang dipimpin Ibas akhirnya mengikuti kelompok besar menjadi 7 fraksi yang ikut menyetujui usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau "Dana Aspirasi".

Kompasianer pada penggalan artikel (10) tersebut menggunakan kata-kata kasar yang ditujukan kepada anggota DPR, melalui pernyataan *usulan dana aspirasi yang menjadi program unggulan para politisi haus perselingkuhan harta dan kekuasaan akhirnya disetujui*. Kompasianer menohok anggota DPR sebagai pihak yang selalu haus harta dan kekuasaan. Pelanggaran maksim pujian dengan menyampaikan kritik secara langsung (menohok mitra tutur) dengan kata atau frasa yang kasar tersebut tidak sopan, terlebih bagi anggota DPR.

4.2.1.2 Kompasianer Didorong Rasa

Emosional ketika Bertutur

Rasa marah atau emosi yang berlebihan ikut mewarnai tulisan para kompasianer dalam rubrik politik *Kompasiana*. Penggunaan tulisan dengan didasari rasa emosi terlihat dalam tulisan berjudul "DPR Mensahkan Cara Mereka Korupsi Berjamaah" berikut ini.

(11) Tapi langkah yang dilakukan oleh para begundal politik di DPR adalah kekeliruan yang sangat besar, mereka dengan sengaja membuat peraturan yang menguntungkan mereka sendiri yang secara tidak langsung bertentangan dengan aturan yang ada karena telah melampaui fungsi dan tugas para anggota DPR tersebut.

Pada penggalan artikel (11) tersebut kompasianer melakukan pelanggaran maksim pujian. Kompasianer menyampaikan kritikan kepada anggota DPR dengan didorong rasa emosi. Rasa marah atau emosi yang berlebihan ikut mewarnai tulisan kompasianer dalam rubrik politik berjudul "Penolakan Dana Aspirasi dan 'Politik Kabut' SBY" berikut.

(12) Usulan "Dana Aspirasi" yang menjadi program unggulan para politisi haus perselingkuhan harta dan Kekuasaan akhirnya disetujui. "Yaa, namanya juga usaha!" Begitu kali ya jawaban oknum DPR nakal..hehe! Ngisin-ngisini!

Penggunaan bahasa yang mengungkapkan kemarahan atau emosi terlihat pada *...para politisi haus perselingkuhan harta dan Kekuasaan akhirnya disetujui.... dan yaa, namanya juga usaha! Begitu kali ya jawaban oknum DPR nakal. hehe! Ngisin-ngisini!* Penggunaan tuturan yang juga mengedepankan emosi dapat terlihat pada artikel berjudul "DPR Mensahkan Cara Mereka Korupsi Berjamaah" berikut ini.

(13) Mereka adalah orang-orang berusia dua kali lipat dari usia saya, mereka sudah sangat layak untuk disebut tua dan dewasa dalam berpikir, namun rupanya kebencian memang selalu berhasil kalahkan nalar seorang manusia. Tapi yang paling menyedihkan sebenarnya ada sebagian mereka yang berprofesi sebagai pengajar, ustad dan dosen yang tidak bisa disebut golongan tidak berpendidikan.

Kompasianer pada penggalan artikel (13) tersebut begitu emosi. Kompasianer emosi ka-

rena anggota DPR, yang berusia dua kali lipat dari usia kompasianer, belum dapat bersikap dewasa. Pelanggaran prinsip kesopanan dengan mengedepankan emosi pada setiap tuturan mengakibatkan ketidaksopanan. Saat kata-kata yang dituturkan tersebut diungkapkan dengan emosi, yang keluar adalah kata-kata yang tidak sopan.

4.2.1.3 Memojokkan Mitra Tutur dalam Bertutur

Tuturan yang memojokkan mitra tutur secara sengaja menjadikan tuturan tidak sopan. Ketidaksopanan ditunjukkan melalui pilihan-pilihan kata yang membuat lawan tutur terpojok dan disalahkan. Penggalan artikel berjudul "DPR Mensahkan Cara Mereka Korupsi Berjamaah" berikut ini memojokkan para anggota DPR.

- (14) Alasan yang dikemukakan oleh anggota DPR yang menyetujui anggaran tersebut secara tidak langsung tidak masuk akal, hal ini hanya dilakukan studi di salah satu propinsi, di Jawa Timur, di mana konstituan anggota DPR dapil Jatim memberikan usulan untuk ada dana yang bisa digunakan secara cepat jika ada masyarakat dari dapil itu mengusulkan suatu program yang tidak bisa direalisasikan di anggaran daerah tersebut, dan memerlukan proses yang berbelit-belit.

Kompasianer dalam penggalan artikel (14) tersebut memojokkan mitra tutur kedua (anggota DPR). Alasan yang dikemukakan anggota DPR dalam menyetujui usulan dana aspirasi dianggap sangat tidak masuk akal. Apalagi studi hanya dilakukan di Jawa Timur. Pelanggaran prinsip pujian dengan memojokkan anggota DPR berfungsi untuk mengkritik. Selain itu, kompasianer ingin menunjukkan kepada anggota DPR bahwa usulan dana aspirasi DPR tersebut tidaklah tepat.

4.2.1.4 Mendasarkan pada Kecurigaan

Kecurigaan yang disampaikan penutur kepada mitra tutur dengan melontarkan beragam tuduhan menjadikan tuturan tidak sopan. Para anggota DPR yang mengusulkan adanya dana aspirasi DPR, menimbulkan beragam kecurigaan di kalangan masyarakat. Penggalan artikel berjudul "Dana Aspirasi atau Konspirasi?" menyampaikan tuduhan atas dasar kecurigaan.

- (15) Sedangkan dalam kasus dana aspirasi atau UP2DP, belum jelas objek riil yang akan dibangun, semuanya masih dalam angan yang dihiasi dengan sebutan aspirasi. Jika sudah tiba waktunya, pembangunan yang dilakukan bukan berdasar proposal aspirasi, namun konspirasi.

Pada penggalan data (15) tersebut, kompasianer menyampaikan kecurigaan kepada anggota DPR bahwa dana aspirasi sebagai sebuah wacana yang belum jelas objek riil yang akan dibangun. Kecurigaan muncul bahwa semuanya masih dalam angan-angan anggota DPR. Kompasianer menuduh apabila usulan tersebut terealisasi, hal itu merupakan konspirasi demi keuntungan para anggota DPR. Kecurigaan yang serupa juga disampaikan dalam artikel berjudul "Dana Aspirasi DPR vs Uji Kepatutan KaBIN dan Panglima TNI" berikut ini.

- (16) "Kalau *ente* gak terima itu barang (dana aspirasi 20 M), *ane* *kagak* lolosin itu barang *ente* (calon KaBIN dan calon Panglima TNI)!" Kira-kira begitu *bargaining position* kalau direka secara berlebihan. Padahal, kan, DPR tahu kalau KaBIN dan Panglima TNI itu prerogatif presiden. DPR tidak berhak menolak, hanya memberi masukan. "Yaa, namanya juga usaha!" Begitu kali ya jawaban oknum DPR nakal. *hehe! Ngisin-ngisini!*

Pada data (16) tersebut, kompasianer menuduh usulan dana aspirasi merupakan permintaan imbalan DPR atas pencalonan kepala

BIN dan Panglima TNI yang diusulkan presiden. Kecurigaan semakin besar terlebih usulan tersebut bergulir seiring agenda penetapan kepala BIN dan Panglima TNI. Bagi kompasianer tersebut, seandainya kecurigaan tersebut benar, sikap DPR tersebut tergolong bentuk kenalakan dan sangatlah memalukan.

Ketiga petikan artikel tersebut banyak didasari kecurigaan terhadap mitra tutur (anggota DPR). Kecurigaan diperkuat dengan rekam jejak anggota DPR yang citranya cenderung negatif, seperti banyaknya korupsi yang melibatkan anggota DPR. Pelanggaran maksim pujian dengan menyampaikan tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap mitra tutur (anggota DPR) berfungsi untuk mengungkapkan maksud DPR yang sebenarnya ketika memutuskan usulan dana aspirasi.

4.2.2 Pelanggaran Maksim Kesepakatan (*Agreement Maxim*)

Pelanggaran prinsip kesopanan terjadi apabila ada pertentangan pemahaman atau pendapat antarpeserta tuturan. Usulan dana aspirasi DPR mendapatkan pertentangan dari masyarakat. Kritik yang disampaikan para kompasianer dalam rubrik Politik *Kompasiana* secara keseluruhan menunjukkan ketidaksepakatan dengan keputusan anggota DPR mengenai usulan dana aspirasi. Penggalan artikel yang berjudul "Dana Aspirasi; Kepedulian ke Rakyat Atau Melanjutkan Tradisi Rampok Uang Rakyat" berikut ini menunjukkan ketidaksepakatan dengan anggota DPR.

- (17) Berbagai persoalan akan muncul dengan dana aspirasi ini mulai dari bagaimana mekanisme pembelanjaannya serta bagaimana aspek keadilannya karena setiap anggota DPR berhak atas dana tersebut namun anggota DPR RI mayoritas di Jawa bagaimana yang berada di luar Pulau Jawa?

Pada penggalan artikel (17) tersebut, kompasianer melakukan pelanggaran maksim kesepakatan dengan menentang usulan dana aspi-

pirasi DPR. Menurut kompasianer tersebut dana aspirasi dapat menimbulkan berbagai persoalan dan ketidakadilan.

Deskripsi pelanggaran prinsip kesopanan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran banyak dilakukan dalam artikel-artikel yang membahas usulan dana aspirasi DPR di rubrik Politik *Kompasiana*. Pelanggaran maksim pujian sebagai bentuk kecaman keras para kompasianer disampaikan dengan mengungkapkannya dalam berbagai cara. Kompasianer mengkritik langsung anggota DPR dengan kata atau frasa yang kasar; bertutur dengan didorong rasa emosi ketika bertutur; sengaja ingin memojokkan mitra tutur; atau menyampaikan tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap mitra tutur dengan melontarkan beragam tuduhan. Selain maksim pujian, pelanggaran juga terjadi pada maksim kesepakatan yang menunjukkan pertentangan pemahaman atau pendapat atas usulan dana aspirasi DPR.

Berbagai pelanggaran prinsip kesopanan tersebut berfungsi untuk menyampaikan kritik pedas sekaligus penolakan kepada para anggota DPR. Bagi kompasianer, yang menempatkan diri sebagai masyarakat, pelanggaran prinsip kesopanan tersebut sangat pantas diberikan kepada anggota DPR. Bagi kompasianer para anggota DPR tersebut jauh tidak sopan dengan menggulirkan usulan dana aspirasi, sedangkan kondisi ekonomi masyarakat sedang terpuruk.

5. Simpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, para kompasianer (penulis artikel) di rubrik Politik *Kompasiana* terkait usulan dana aspirasi DPR mematuhi prinsip-prinsip kesopanan. Pemenuhan prinsip itu meliputi maksim kearifan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, dan maksim simpati. Pematuhan tersebut berfungsi untuk menunjukkan bahwa kompasianer menempatkan diri sebagai bagian masyarakat. Kritikan kepada anggota DPR yang telah menyetujui usulan dana aspi-

rasi disampaikan dengan sopan. Sedangkan pembaca (masyarakat) merasa dibela dan mendapat dukungan untuk menentang usulan dana aspirasi.

Kedua, pelanggaran prinsip kesopanan banyak dilakukan kompasianer. Pelanggaran pada maksim pujian dilakukan dengan mengecam keras anggota DPR. Kecaman disampaikan dengan berbagai cara, yakni mengkritik langsung anggota DPR dengan kata atau frasa yang kasar; bertutur dengan didorong rasa emosi; sengaja ingin memojokkan mitra tutur; menyampaikan tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap mitra tutur dengan melontarkan beragam tuduhan. Pelanggaran kesantunan yang lain diwujudkan dengan melakukan pelanggaran terhadap maksim kesepakatan. Realisasinya dengan menunjukkan adanya pertentangan pemahaman atau pendapat mengenai usulan dana aspirasi DPR. Pelanggaran tersebut berfungsi untuk menyampaikan kritik sekaligus penolakan terhadap usulan dana aspirasi DPR.

Penyampaian kritik kepada mitra tutur sebaiknya tetap mematuhi prinsip kesopanan. Terlebih, mitra tutur tersebut anggota DPR yang juga pilihan rakyat. Kritikan kepada para anggota DPR tetap harus disampaikan apabila membuat kebijakan yang tidak prorakyat. Hanya saja, penyampaian kritikan harus memperhatikan isi dan cara menyampaikannya dengan sopan. Kesopanan dalam menyampaikan kritikan tidak akan mengurangi esensi kritikan itu sendiri. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengungkapkan berbagai latar belakang para kompasianer yang cenderung melanggar prinsip kesopanan.

Daftar Pustaka

Bhakti, Ikrar Nusa. "Pecah Kongsi Karena Dana Aspirasi." Diakses pada tanggal 25 Juni 2015. <http://print.kompas.com/baca/2015/06/25/Pecah-Kongsi-karena-Dana-Aspirasi>

Kompasiana. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2014. <http://id.wikipedia.org/wiki/Kompasiana>.

Leech, Geoffrey. 1993. *Prinsip-prinsip Pragmatik*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

Masfufah, Nurul. 2013. "Ketidaksantunan Berbahasa di SMA N 1 Surakarta: Sebuah Kajian Sosiopragmatik". Dalam Yudianti Herawati (Ed). *Benua Etam: Bunga Rampai Penelitian Kebahasaan dan Kesastraan*, 99-122. Yogyakarta: Azzagrafika.

Miles, Matthew B. dan A. Micheal Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitaitaif* (Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI-Press.

Moleong, L.J. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Pusat Bahasa. *KBBI Daring*. Departemen Pendidikan Nasional. <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>. Diakses pada tanggal 27 Juni 2015.

Pranowo. 2009. *Berbahasa Secara Santun*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Rahardi, Kunjana. 2005. *Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

Wijana, I Dewa Putu. 1996. *Dasar-Dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Wijana, I Dewa Putu dan Mohammad Rohmadi. 2009. *Analisis Wacana Pragmatik: Kajian Teori dan Analisis*. Surakarta: Yuma Pustaka.

Sumber Data

Alhasany, Muthiah. "Benang Merah Dana Aspirasi Dengan Revisi UU KPK". Diakses pada tanggal 27 Juni 2015. http://www.kompasiana.com/empuratu/benang-merah-dana-aspirasi-dengan-revisi-uu-kpk_558c893fa423bda410ee701e

- Axstea 99. "Politik Gratisan Dana Aspirasi". Diakses pada tanggal 27 Juni 2015. http://www.kompasiana.com/axtea99/politik-gratisan-dana-aspirasi_558f4531329773500c32ce0d
- Aznil S.T. "Kekuatan Setan di Belakang DPR". Diakses pada tanggal 27 Juni 2015. http://www.kompasiana.com/aznil/kekuatan-setan-di-belakang-dpr_558c67da5dafbdd90d1b0155
- "Bertentangan dengan visi misi, alasan Jokowi tolak dana aspirasi". Diakses pada tanggal 25 Juni 2015. <http://www.merdeka.com/politik/bertentangan-dengan-visi-misi-alasan-jokowi-tolak-dana-aspirasi.html>
- "BI Pangkas Target Pertumbuhan Ekonomi 2015 Jadi 5,1%". Diakses 27 Juni 2015. <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/05/28/130843/bi-pangkas-target-pertumbuhan-ekonomi-2015-jadi-5-1>
- "DPR Sahkan Peraturan Dana Aspirasi". Diakses pada tanggal 25 Juni 2015 <http://nasional.kompas.com/read/2015/06/23/17034341/DPR.Sahkan.Peraturan.Dana.Aspirasi>
- Fadilah, Muhammad Yasin. "Dana Aspirasi untuk Rakyat Atau untuk Wakil Rakyat?". Diakses pada tanggal 27 Juni 2015. http://www.kompasiana.com/muhammadyasinfadilah/dana-aspirasi-untuk-rakyat-atau-untuk-wakil-rakyat_558f8e61aa23bdea13beeada
- Kodri, Imam. "Penolakan Dana Aspirasi Dan 'Politik Kabut' SBY". Diakses pada tanggal 25 Juni 2015. http://www.kompasiana.com/imamkodrimirkasan/penolakan-dana-aspirasi-dan-politik-kabut-sby_558acdf9c9afbd312a1ef2c3
- Setyawan, Bambang. "Akrobat Ala Demokrat Dalam Dana Aspirasi". Diakses pada tanggal 25 Juni 2015. http://www.kompasiana.com/bamset2014/akrobat-ala-demokrat-dalam-dana-aspirasi_558b0816b29273bb078b46e6
- Siswandanu, Eko. "Dana Aspirasi atau Konspirasi?". Diakses pada tanggal 25 Juni 2015. http://www.kompasiana.com/ekosiswandanu/dana-aspirasi-atau-konspirasi_558b3610729373560528143a
- Yansi, M. "DPR Mensahkan Cara Mereka Korupsi Berjamaah". Diakses pada tanggal 25 Juni 2015. http://www.kompasiana.com/muhyansi/dpr-mensahkan-cara-mereka-korupsi-berjamaah_558b3726397b61060d48fadc

